

EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI (MIPT) DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Eva Yulinda^{1*}, Sofjan Aripin²⁾, Wihatmoko Waskitoaji³⁾, Hedi Heryadi⁴⁾, Eko Kurniawan⁵⁾

¹Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
evayulinda78@gmail.com

²Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
sofjan@ecampus.ut.ac.id

^{3,4,5}Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Permenristekdikti Nomor 24 Tahun 2019 bertujuan untuk mendorong Perguruan Tinggi (PT) mengelola inovasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Pengelolaan inovasi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) belum optimal seperti yang diharapkan. Untuk itu, implementasi Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (MIPT) diharapkan dapat berperan optimal dalam memfasilitasi dan mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil penelitian di PTN. Langkah dan strategi yang dilakukan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mewujudkan inovasi penelitian di PT, khususnya dengan mendorong penerapan Manajemen Inovasi di masing-masing PT. Selain itu, mereka memberikan bimbingan teknis dalam mengukur kinerja inovasi untuk memberikan hasil yang diharapkan, yaitu penguatan inovasi di PT. Pelaksanaan MIPT di PTN telah efektif dilaksanakan dan menjadi tujuan utama PTN, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor penekanan dalam peningkatan produktivitas kinerja inovasi terkait dengan jumlah penelitian, penemuan, produk inovasi, penguatan kebijakan kelembagaan manajemen inovasi, dan penataan organisasi yang memerlukan pembentukan lembaga pengelola inovasi. Tantangan PTN dalam MIPT terkait dengan tahapan komersialisasi produk inovasi ke dunia industri, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dan Paten. Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah perlunya kesinambungan sosialisasi, tersedianya modul teknis yang memberikan penjelasan rinci tentang apa yang harus dilakukan PTN dalam mengelola inovasi dan kejelasan kewenangan atas PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang MIPT.

Kata Kunci: Evaluasi, Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Policy Evaluation of the Ministry of Research, Technology and Higher Education Regulation No. 24 of 2019 aims to encourage The University (PT) to manage innovations that impact people's lives. The management of innovation in State Universities (PTN) is not optimal as expected. For this reason, the implementation of Higher Education Innovation Management (MIPT) is expected to play an optimal role in facilitating and realizing the improvement, development, and utilization of research results in PTN. Steps and strategies are taken by the Ministry of Research and Technology (Kemristek)/National Research and Innovation Agency (BRIN) to realize research innovations in PT, specifically by encouraging the implementation of Innovation Management in their respective PT. In addition, they are providing technical guidance in measuring innovation performance to provide the expected results, namely strengthening innovation at PT. The implementation of MIPT in PTN has been effectively implemented and has become the primary goal of PTN, but there are still obstacles in its implementation. Several factors of emphasis in increasing the productivity of innovation performance are related to the number of researches, inventions, innovation products,

strengthening innovation management institutional policies, and organizational arrangements that require the formation of innovation management institutions. The challenges of PTN in MIPT are related to the stages of commercializing innovation products to the industrial world, managing Intellectual Property Rights and Patents. Some recommendations that need to be considered are the need for continuity of socialization, the availability of technical modules that provide detailed explanations of what PTN must do in managing innovation and clarity of authority over the Regulation No. 24 of 2019 concerning MIPT.

Keywords: *Evaluation, Higher Education Innovation Management, Policy.*

PENDAHULUAN

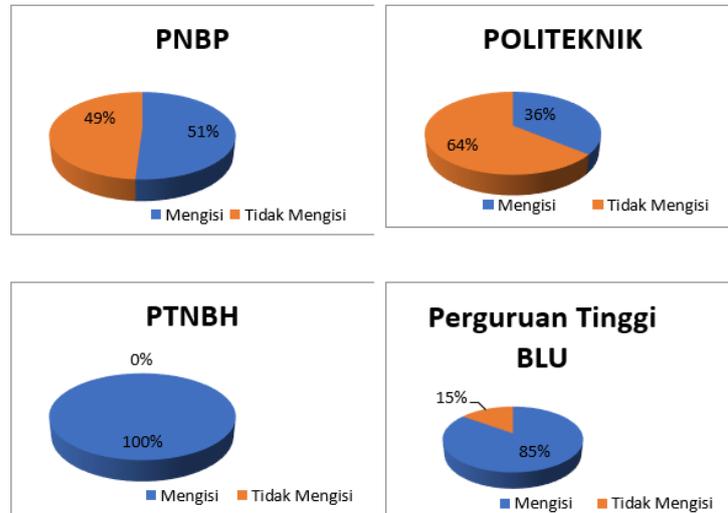
Tuntutan dan tantangan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian nasional, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran strategis perguruan tinggi dalam menghasilkan luaran riset yang berbasis inovasi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan perguruan tinggi mendapatkan suatu *legal standing* untuk menerapkan Manajemen Inovasi (MI).

Implementasi kebijakan ini telah disosialisasikan ke Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki fungsi mendorong inovasi di PT yang terkait dengan bidang inovasi, kerjasama, kewirausahaan atau bidang lain yang sesuai. Sosialisasi dilakukan kepada 123 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 3126 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia pada 14 wilayah L2Dikti. Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi telah resmi berpisah pada akhir tahun 2019. Keberadaan Permenristekdikti Nomor 24 tahun 2019 masih dijadikan rujukan kebijakan yang menjamin dari tugas Kemenristek/BRIN dapat terlaksana.

Indikator kinerja inovasi berada pada kriteria *outcome* dalam indikator dan bobot pemeringkatan PT yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Dengan persentase sebesar 5% pada tahun 2018, 12,5% tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 25% dari 30%. Dapat terlihat bahwa porsi penilaian kinerja inovasi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya bagi PT dalam pelaksanaan kinerja inovasinya.

Kebijakan Permenristekdikti Nomor 24 Tahun 2019 saat ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun, realisasi dalam implementasi peraturan ini masih banyak PT yang belum sepenuhnya menyelenggarakan fungsi MI di PT masing-masing. Hal ini dikarenakan keberagaman kemampuan PT dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, serta kompleksitas sistem PT di Indonesia sehingga berujung pada variasi kemampuan dalam pengelolaan inovasi. Selain itu, kendala yang masih kurang dalam implementasi kebijakan ini adalah pemahaman dari PT tentang kebijakan tersebut, khususnya implementasi pada PTN yang langsung dibawah pembinaan Kementerian yang pengelolaan pembiayaan bersumber dari APBN. Data pengisian borang kinerja inovasi pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1 masih belum maksimal. Berdasarkan data pemetaan kekuatan dan kelemahan PT dalam mengelola proses inovasi pada pengukuran kinerja inovasi, terdapat

5 (lima) indikator yang relevan dalam pengukuran tersebut yaitu kebijakan, kelembagaan, jejaring, sumberdaya, dan hasil inovasi.



Gambar 1. Pengisian Borang Kinerja Inovasi PTN Tahun 2020
 (Sumber: tautan <https://simanis.ristekbrin.go.id>)

Mengacu pada hasil pengisian borang kinerja inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 ternyata masih terdapat PTN yang mengalami hambatan atau kendala dalam penyelenggaraan MIPT. Kriteria dari 3 (tiga) PTN yang dimaksud dalam pengisian borang kinerja inovasi dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria PTN dalam Pengisian Borang Kinerja Inovasi

No.	Perguruan Tinggi	Pengisian Borang Kinerja Inovasi	
		2019	2020
1	PTN-BH	V	V
2	PTN-BLU	X	X
3	PTN-SATKER	X	X

(Sumber: tautan <https://simanis.ristekbrin.go.id>)

Implementasi peraturan baik dalam penyelenggaraan fungsi MIPT dan pemahaman atas peraturan tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi PTN, yang diindikasikan oleh evaluasi kebijakan MIPT yang belum optimal.

METODE

Desain yang digunakan metode kualitatif deskriptif, untuk menganalisis berbagai sudut pandang (*multi-perspectival analysis*) dari hasil wawancara mendalam (*depth interview*) para informan baik dari implementor kebijakan (Koordinator kegiatan Kemristek/BRIN) dan berbagai kelompok sasaran (*target group*) yaitu PTN yang diwakili

oleh koordinator/ketua lembaga yang berkompeten dan bertanggungjawab terhadap implementasi manajemen inovasi di PT. Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh dari para pengelola MIPT. Analisis data diproses dari pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, laporan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori PTN (PTN-BH, PTN-BLU dan PTN-Satker), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang relevan dengan Evaluasi Kebijakan tentang MIPT di PTN.

PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan manajemen inovasi perguruan tinggi (MIPT) adalah evaluasi kebijakan formatif yang merupakan bentuk penilaian atas hasil dari kebijakan peraturan yang dilakukan pada proses implementasi kebijakan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan MIPT dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi dan mewujudkan peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian di PT.

Evaluasi dengan memonitor (*On-going evaluation*), tepat dilakukan saat ini. Seperti yang dikemukakan Palumbo (1987) bahwa Evaluasi Formatif adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh sebuah program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang dapat meningkatkan keberhasilan atas implementasi tersebut. Rossi dan Freeman (1979) menyatakan beberapa alasan mengapa evaluasi dilakukan, yaitu merupakan evaluasi terhadap proses, menilai tingkat kelayakan atas standar aturan, menggunakan model-model dalam implementasi, meningkatkan efektivitas dari administrasi dan manajemen program, dan melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/program. Adapun tiga persoalan yang meliputi: 1) Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; 2) Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak dan 3) Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program.

Evaluasi Kebijakan MIPT terhadap produktivitas di Perguruan Tinggi

Evaluasi adalah terkait dengan menilai proses implementasi kebijakan sesuai dengan kelayakan program yang sedang berlangsung. Proses implementasi dari kebijakan MIPT di PTN sudah dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada kelompok sasaran yang tepat. Terlihat bahwa hasil pengumpulan data yang diperoleh divalidasi untuk menjadi masukan dalam proses pemeringkatan, yang akan bersanding dengan indikator lainnya yang sudah ada sebelumnya. Walaupun dengan berbagai kendala tersebut proses evaluasi dan pengolahan data MIPT berhasil dilaksanakan dan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 25% dari 30% indikator *outcome*.

Implementasi kebijakan MIPT pada PTN-BH memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dengan berkembangannya Lembaga Manajemen Inovasi yaitu *Science Techno Park* (STP) sebagai tempat untuk memulai dan memproduksi produk inovasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melibatkan akademisi, bisnis atau dunia usaha dan industri serta pemerintah. STP bertujuan untuk meningkatkan dan

mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan fasilitas yang telah berjalan. Upaya lain juga dapat dilihat dari kondisi komersialisasi produk inovatif yaitu proses merancang/mendesain produk, membuat produk (prototipe), memproduksi (pesanan), dan kerjasama dengan perusahaan *Start Up* dan *Spin Off* sudah berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan implementasi kebijakan MIPT pada PTN-BLU cukup signifikan. Dimana dalam setiap keluaran penelitian, pengembangan dan perekayasaan harus mengacu atau memenuhi unsur-unsur inovasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen inovasi terlihat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, yakni dengan mengadakan *workshop* untuk menunjang inovasi sebagai hasil luaran penelitian, serta pendampingan pengurusan paten, hak cipta, desain industri dan merek.

Implementasi MIPT pada PTN-Satker menerangkan bahwa proses implementasi kebijakan MIPT belum berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan umum MIPT. Namun untuk mencapai produktivitas inovasi mulai dilakukan penataan organisasi dengan membentuk Lembaga Manajemen Inovasi. Dengan adanya Lembaga Manajemen Inovasi diharapkan memiliki fungsi dalam hilirisasi produk unggulan teknologi dan *problem solver* masalah industri. Adapun fungsi tersebut adalah membangun kerjasama dengan pemerintah, mitra industri dan masyarakat umum; mengembangkan prototipe lab produk unggulan teknologi menjadi prototipe industri hingga komersialisasi; dan *problem solver* masalah industri dan masalah masyarakat melalui mitra industri.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mazmanian (1983) bahwa proses implementasi kebijakan yang efektif harus melibatkan pihak-pihak dari luar pemerintah. Senada dengan pendapat J.P Lester dan J. Stewart, Jr, (2000) bahwa implementasi kebijakan sebagai pengadministrasian hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bersama-sama digunakan dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program.

Mewujudkan program-program secara nyata yang melibatkan para aktor dan organisasi, sistem dan prosedur perlu saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan implementasi kebijakan MIPT di PTN sudah berjalan efektif, utamanya pada PTN-BH, namun pada PTN-BLU dan PTN-Satker perlu dilakukan optimalisasi dalam implementasinya sebagai penguatan dalam penyelenggaraan MIPT dengan peningkatan produktivitas kinerja inovasi, penguatan kelembagaan manajemen inovasi serta penyediaan dan peningkatan kualitas SDM, anggaran dan sarpras.

Penyelenggaraan sesuai persyaratan atau standard kebijakan MIPT

Evaluasi proses kebijakan MIPT sudah ditentukan (dirancang) dan diterapkan dalam implementasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 24 Tahun 2019 terkait fungsi dari Manajemen Inovasi yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi telah dapat dipenuhi PTN walaupun belum sempurna atau masih ada beberapa hambatan. Tahap perencanaan yaitu memberi gambaran umum mengenai dukungan Perguruan Tinggi terhadap inovasi. Tujuan dari kategori ini adalah memicu PT untuk memformulasikan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung upaya penguatan inovasi. Diperoleh bahwa pelaksanaan kebijakan MIPT di

PTN ini sudah sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 24 Tahun 2019 yaitu dengan adanya kebijakan institusi dalam Renstra (Rencana Strategis) PT yang mendorong pengembangan inovasi yang termuat di rencana induk (selain insentif kepada dosen) yang bertujuan untuk mendorong pengembangan inovasi. Rencana induk adalah perencanaan strategis dalam suatu organisasi pendidikan tinggi, mencakup bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada berdasarkan pertimbangan analisis efisiensi, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, yang di dalamnya berkaitan dengan rancangan riset dan inovasi.

Pengorganisasian di PTN diketahui dengan membuat kebijakan penguatan kelembagaan MI yaitu pembentukan lembaga manajemen inovasi yang berfungsi sebagai hilirisasi produk unggulan, restrukturisasi organisasi pusat penelitian dalam 5 tahun kedepan dan tersedianya tata pamong di *Science Techno Park* (STP) dengan manajemen tersendiri. Pelaksanaan implementasi kebijakan MIPT yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan fungsi MI dalam bentuk layanan dalam rangka menjalankan suatu fungsi. Pada PTN telah menjalankan fungsi tersebut dengan penyediaan data dan informasi hasil inovasi yang didapat untuk pembuatan keputusan serta menilai berbagai peristiwa dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tahapan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan yang penting dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Dengan melakukan validasi atas hasil pengukuran kinerja inovasi sebagai upaya yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah data dan fakta yang ada menjadi suatu informasi yang valid dan sah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan secara objektif ke depannya.

Sumber daya yang digunakan dalam rangka mendorong inovasi

Mendorong inovasi di PT sumber daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis. Sumber daya akan memberikan gambaran mengenai potensi atau aset yang dimiliki. Kebijakan Kemenristek/ BRIN memberikan dukungan sumber daya baik berupa anggaran dan SDM. Dengan keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki, sosialisasi penyelenggaraan MI ke berbagai wilayah PT di Indonesia tetap dilaksanakan seoptimal mungkin untuk mendorong PT melaksanakan MI di PT masing-masing serta memberikan bimbingan teknis dalam pengukuran kinerja inovasi supaya dapat memberikan hasil yang diharapkan yakni penguatan inovasi di PT.

Dukungan Kebijakan MIPT dalam mendorong inovasi di PTN ada pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kualitas peneliti dan penelitiannya melalui pelatihan, workshop, *coaching* atau klinik proposal, Anggaran tersedia dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan berkomitmen penuh dalam inovasi perguruan tinggi dengan mengupayakan dana penelitian dari PNBP. Selain itu, kebijakan dan dukungan yang dilakukan serta peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana berupa gedung dan perkantoran, rumah produksi, dan juga *teaching industry*, laboratorium dan bengkel atau workshop. Sesuai ungkapan ahli (Grindle, 1980) bahwa faktor sumberdaya memiliki pengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Sebagai wujud nyata dari proses implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen pendukung kebijakan yakni sumber daya manusia (pelaksana), sumber dana (besar dan sumbernya) dan sumber daya pendukung (sarana prasarana).

Komitmen organisasi dalam hal ini sangat penting dibutuhkan dalam mendukung kebijakan MIPT. Tidak hanya komitmen dari pimpinan tetapi juga seluruh staf (sumber daya manusia) diperlukan dan menjadi salah satu yang utama dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, dukungan sarana maupun prasarana serta kapasitas finansial untuk melaksanakan kebijakan merupakan kriteria penting lainnya yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan terwujudnya tujuan kebijakan.

Hambatan Implementasi Kebijakan Manajemen Inovasi

Persoalan atau hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan MIPT dapat dibagi kedalam dua kategori. Yang pertama adalah hambatan yang bisa di selesaikan secara internal yaitu terkait anggaran, sarana dan prasarana serta peraturan-peraturan. Yang kedua adalah hambatan yang tidak bisa diselesaikan secara internal dalam hal ini terkait dunia usaha dan industri yang belum intensif dan ekstensifnya komersialisasi. Oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah agar dunia usaha dan industri mau melihat, mengadopsi, memproduksi dan mengkomersialisasikan hasil-hasil penelitian yang ada di PT karena tidak ada sistem produksi dan komersialisasi di dalam PT, sehingga perlu keterlibatan dunia usaha dan industri sejak awal. Hal ini juga disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan pengguna atas produk-produk hasil riset dalam negeri.

Hambatan atau kendala lain yang dihadapi adalah tantangan untuk mendorong dosen untuk memiliki penelitian minimal 1 (satu) penelitian setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong dosen membuat *road map* penelitian menuju TKT 7 sampai dengan TKT 9 dan implementasinya. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kompetensi untuk memetakan keahlian setiap dosen dalam penelitian, pengembangan dan perekayasaan sesuai bidangnya. Hambatan yang juga masih dirasakan adalah terhadap *problem solver* masalah industri yang mana masalah industri dapat terselesaikan dan mampu beroperasi di industri, namun dosen peneliti yang terlibat sulit memformulasikannya ke dalam publikasi ilmiah. Selain itu HAKI dari *problem solver* masalah industri tersebut sulit dilaksanakan dan pengurusan paten di PT masih memerlukan jangka waktu yang panjang. Implementasi kebijakan begitu kompleksitas dengan banyaknya aneka ragam jenis kebijakan dan proses implementasinya. Tidak ada aktor tunggal yang dapat berdiri sendiri, kemudian ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan serta kompleksitas terkait pendanaan kebijakan itu sendiri.

Hal serupa yang dikemukakan oleh D.W Brinkerhoff dan B.L Crosby (2002) bahwa implementasi kebijakan bukanlah sebuah proses yang linier, tidak ada satu agensi (aktor implementasi) tunggal yang mampu menangani usaha-usaha implementasi kebijakan, implementasi kebijakan dapat memunculkan pihak yang menang dan yang kalah dan kebijakan baru pada umumnya tidak disertai dengan anggaran yang disediakan untuk itu.

KESIMPULAN

Kebijakan MIPT kurang terimplementasi oleh PTN sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut khususnya PTN-Satker dan PTN-BLU terkecuali untuk PTN-BH, indikasi ini menunjukkan bahwa kemandirian suatu PTN dalam mengelola perguruan tinggi sangat menentukan. Peran pemerintah dalam pembinaan PTN untuk terimplementasinya MIPT sangat menentukan yaitu mendorong PTN mandiri dalam

melaksanakan inovasi penelitian yang berbasis luaran (*outcome*) dan mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengalokasian anggaran tiap tahunnya dan penyediaan serta peningkatan kelengkapan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Borang Kinerja Inovasi Perguruan Tinggi, 2020. <https://simanis.ristekbrin.go.id>
- Brinkerhoff, D.W and Crosby, B.L., 2002. *Managing policy reform: concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries*. Bloomfield, USA: Kumarian Press, Inc.
- Grindle, M.S. (1980). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 213/M/KPT/2019 Tentang Klasterisasi dan Peningkatan Perguruan Tinggi, 2019.
- Lester, J.P dan Steward, J.Jr. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont CA: Wadsworth.
- Mazmanian, D.A & Sabatier, P.A (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview III Scott, Foresman and Company
- Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi. Direktorat Sistem Inovasi, 2018. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- Palumbo, D.J (e.d). (1987). *"The Politics of Program Evaluation"*, Sage, Newbury Park, Cal.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi, 2019, Jakarta
- Rossi, Peter H., Mark W. Lipsey & Howard E. Freeman (1979). *Evaluation: A Systemic Approach*. Beverly Hills: Sage Publications.